

NOTA DINAS

Nomor: 04/SJ.4.1/HK.02.01/01/2025

Kepada Yth. : Kepala Biro Hukum
Dari : Ketua Tim Peraturan Perundang-undangan
Hal : Penyampaian Laporan Rapat Harmonisasi Kemenkum Terhadap RPM Komdigi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital
Klasifikasi : Biasa
Tanggal : 10 Januari 2025

Sehubungan dengan undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Nomor PPE.PP.01.05-055 tanggal 6 Januari 2025 hal Undangan Rapat, telah diselenggarakan Rapat Harmonisasi dengan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum (Kemenhukum) pada tanggal 8 Januari 2025 di Jakarta. Rapat dibuka oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan secara daring, dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pan dan RB secara daring, dan perwakilan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian keuangan secara fisik, Tiim Biro Kepegawaian dan Organisasi selaku pemrakarsa, Tim Biro Hukum serta masing-masing perwakilan unit kerja teknis di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hasil rapat antara lain sebagai berikut:

1. RPM Komdigi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (RPM OTK Komdigi) disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Presiden 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengatur bahwa perlu melaksanakan penataan organisasi Kementerian yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
2. Menteri PanRB melalui surat Nomor: B/6/M.KT.01/2025 tanggal 2 Januari 2025 hal Persetujuan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital pada prinsipnya menyetujui penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Komdigi sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Perpres Nomor 174 Tahun 2025 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital.
3. Pembahasan dilakukan terhadap catatan-catatan yang disampaikan oleh Kementerian Hukum, Kementerian Pan dan RB, dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Adapun catatan tersebut dilakukan konfirmasi oleh Kemenkum kepada pemrakarsa dan unit kerja terkait.

4. Berdasarkan hasil rapat ini, RPM OTK Komdigi telah selesai dilakukan Harmonisasi dengan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenhukum. Selanjutnya Tim Harmonisasi Kemenhukum akan menyesuaikan RPM OTK Komdigi sesuai dengan hasil rapat dan menyusun Berita Acara yang perlu ditandatangani dan selanjutnya akan menyampaikan Surat Selesai Harmonisasi kepada Biro Hukum Kementerian Komdigi. Adapun laporan selengkapnya disampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.

Rosy Ervinna